

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun  
2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:  
PRIYO TRI PRANOTO**

**B 200 130 364**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

**PRIYO TRI PRANOTO**  
B 200 130 364

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si.)**

## HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP  
ALOKASI BELANJA MODAL  
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

Yang ditulis oleh:

**PRIYO TRI PRANOTO**  
**B 200 130 364**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari : Kamis, 27 Desember 2018  
Dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Fauzan, S.E., M.Si., Ak.  
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Muh. Abdul Aris, M.Si.  
(Anggota 2 Dewan Penguji)

  
(  )  
(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
**Dr. Syamsudin, M.M)**  
**MDN. 0017025701**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Desember 2018

Penulis



**PRIYO TRI PRANOTO**  
**B 200 130 364**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis dengan menggunakan data sekunder dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan *softcopy* Alokasi Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Sampel dalam penelitian ini adalah dari sebagian dari populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2014 – 2016. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method*. Metode analisis data menggunakan : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )). Hasil analisis data dapat diperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan dan Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Retribusi Daerah (RD) dan Alokasi Belanja Modal.

**Abstract**

This study aims to determine the Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Regional Retribution affecting the Allocation of Capital Expenditures. This research method uses a type of quantitative research by testing the hypothesis by using secondary data by looking at the Budget Realization report and the softcopy of the allocation of district city Capital Expenditures in Central Java Province. The population in this study is all districts and cities in Central Java Province and the sample in this study is that from a portion of the population there will be taken a number of regency and city governments to be sampled according to the criteria from 2014 - 2016. Determination of samples is done using purposive sampling method. Data analysis methods used: Classical Assumption Test (Normality Test, Multicollinearity Test, Heteroscedasticity Test and Autocorrelation Test), Hypothesis Test (Multiple Linear Regression Test, Statistic Test t (Partial), F Statistical Test (Simultaneous) and Determination Coefficient Test ( $R^2$ )). The results of data analysis can be obtained from the results of Regional Original Revenue (PAD) which have an effect on the Allocation of Capital Expenditures statistically significantly, the General Allocation Fund (DAU) has a statistically significant Allocation of Capital Expenditure, the Special Allocation Fund (DAK) has a statistically significant effect and Regional Retribution (RD) has no effect on the Capital Expenditure Allocation statistically significant. Keywords: Regions (PAD),

General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Regional Retribution (RD) and Allocation of Capital Expenditures.

**Keywords :** regional original income (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), REGIONAL RETRIBUTION (RD) and allocation of capital expenditures.

## 1. PENDAHULUAN

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Desentralisasi telah menjadi topik atau isu yang populer di Indonesia, terutama sejak pemerintah Indonesia memperkenalkan Kebijakan Otonomi Daerah. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Esensi kebijakan ekonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia yang tentunya juga diharapkan berimplikasi pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat dibandingkan dengan peristiwa masa lalu.

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. (Kusnandar dan Siswanto, 2012)

Berdasarkan desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi yang telah dijalankan puluhan tahun. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan tersebut. Dengan

kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Sumber pembiayaan lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan atau BUMD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, sebagai contoh melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik. Bambang (2010) dalam penelitian diperoleh bahwa DAU (Hibah) dan PAD (Pendapatan Asli) secara signifikan mempengaruhi operasi, modal dan total pengeluaran pemerintah daerah, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya. DAU (Hibah) dan PAD (Pendapatan Asli), bagaimanapun, terbukti secara signifikan mempengaruhi operasi, modal dan total Alokasi Belanja Modal, untuk tahun yang bersangkutan dan tahun berikutnya.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional (Yuwono, 2008:51). Pemungutan retribusi berdasarkan undang-undang mengatur proses penetapan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Dalam hal retribusi pihak provinsi maupun kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Telah disampaikan bahwa undang-undang PDRD diadakan perubahan dengan beberapa dasar

pertimbangan. Dengan pertimbangan tersebut dilakukannya perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena memudahkan penyesuaian pendapatannya sejalan dengan peningkatan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Waluyo, 2013).

Penelitian berbeda dilakukan oleh Febrian Dwi Prakarsa (2016) mengenai Pendapatan Asli Daerah Dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak signifikan dan berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Ini juga memperlihatkan bahwa penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pemerintah daerah justru menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Ardiansyah dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dikategorikan cukup berhasil dalam menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah nya dengan disertai penggunaan sebagian besar Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk belanja modal. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan Alokasi Belanja Modal di provinsi tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah ini dalam mencapai kemandirian daerah tentunya harus diapresiasi karena inilah esensi dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah. Implikasi penelitian yang dapat ditarik adalah bahwa semangat desentralisasi untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal dalam upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seyogyanya sudah menjadi perhatian serius bagi daerah-daerah yang belum mencapai itu.

## **2. METODE**

Desain penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan Realisasi Anggaran dan *softcopy* Alokasi Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data panel (gabungan data *cross section* dan *time series*). Populasinya seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampelnya sebagian dari populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2014 – 2016. Teknik Pengambilan Sampel

menggunakan *purposive sampling method*. Variabel dependen yang digunakan Alokasi Belanja Modal dan Variabel Independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Retribusi Daerah (RD). Metode Analisis Data dengan a) Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. b) Uji Hipotesis meliputi Uji Regresi Linier Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan), dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

| Keterangan     | Pendapatan Asli Daerah | Dana Alokasi Umum      | Dana Alokasi Khusus  | Retribusi Daerah     | Alokasi Belanja Modal |
|----------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Mean           | 284614,1910            | 907402,1512            | 134837,8368          | 26528,4982           | 323144,6774           |
| Median         | 251816,6700            | 908643,7400            | 85838,6900           | 22217,8600           | 282090,0700           |
| Mode           | 144065,42 <sup>a</sup> | 390732,54 <sup>a</sup> | 3750,10 <sup>a</sup> | 6058,58 <sup>a</sup> | 51980,73 <sup>a</sup> |
| Std. Deviation | 187868,65247           | 240176,65470           | 109190,42902         | 18150,71049          | 168549,99077          |
| Minimum        | 144065,42              | 390732,54              | 3750,10              | 6058,58              | 51980,73              |
| Maximum        | 1491645,90             | 1398539,65             | 483813,45            | 123215,03            | 1026716,90            |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Menurut hasil analisis diatas menunjukkan jumlah sampel yang diteliti 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah mempunyai sampel mean 284614,1910, median 251816,6700, mode 144065,42, std. deviation 187868,65247, nilai minimum 144065,42 dan nilai maximum 1491645,90. Dana Alokasi Umum mempunyai sampel mean 907402,1512, median 908643,7400, mode 390732,54, std. deviation 240176,65470, nilai minimum 390732,54 dan nilai maximum sebesar 1398539,65. Dana Alokasi Khusus mempunyai sampel mean 134837,8368, median 85838,6900, mode 3750,10, std. deviation 109190,42902, nilai minimum 3750,10 dan nilai maximum 483813,45. Dan Retribusi Daerah mempunyai sampel mean 26528,4982, median 22217,8600, mode 6058,58, std. deviation 18150,71049, nilai minimum 6058,58 dan nilai maximum 123215,03.

Tabel 2. Hasil Pengujian Normalitas

| Variabel                 | Sig (2-tailed) | p-value  | Keterangan   |
|--------------------------|----------------|----------|--------------|
| Undstandardized residual | 0,035          | P > 0,05 | Tidak Normal |

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil diketahui bahwa nilai signifikansi kolmogrov-smirnov sebesar 0,035, dapat diketahui bahwa semua p-value untuk data ternyata lebih

kecil dari  $\alpha=0,05\%$  ( $0,035<0,05$ ), sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan uji *Central Limit Theorem (CLT)* yang menyatakan bahwa data dikatakan terdistribusi dengan normal jika ukuran sampel yang digunakan cukup yaitu lebih dari 30 dalam penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun hasil dari uji normalitas tidak terdistribusi normal, namun dikarenakan sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 sesuai dengan uji *Central Limit Theorem (CLT)* dianggap normal.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinieritas

| No | Variabel                     | Tolerance | VIF   | $\alpha$ | Keterangan              |
|----|------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------------|
| 1  | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0,320     | 3,127 | 10       | Bebas multikolinieritas |
| 2  | Dana Alokasi Umum (DAU)      | 0,650     | 1,537 | 10       | Bebas multikolinieritas |
| 3  | Dana Alokasi Khusus (DAK)    | 0,692     | 1,445 | 10       | Bebas multikolinieritas |
| 4  | Retribusi Daerah (RD)        | 0,338     | 2,960 | 10       | Bebas multikolinieritas |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  $VIF < 10$  dan nilai toleransi  $> 0,1$ , sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel                     | Sign. | p*       | Keterangan                |
|------------------------------|-------|----------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0,222 | $p>0,05$ | Bebas heteroskedastisitas |
| Dana Alokasi Umum (DAU)      | 0,737 | $p>0,05$ | Bebas heteroskedastisitas |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)    | 0,673 | $p>0,05$ | Bebas heteroskedastisitas |
| Retribusi Daerah (RD)        | 0,317 | $p>0,05$ | Bebas heteroskedastisitas |

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018

Pada Tabel 4 ditunjukkan hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas, karena nilai  $p>0,05$  atau tidak signifikan pada  $\alpha=5\%$ . Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

| Durbin-Watson | Ketentuan     | Kesimpulan                                  |
|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| 1,691         | 1.500 - 2,500 | Tidak ada autokorelasi positif atau negatif |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,691, dimana hasil ini terletak 1,500 - 2,500, sehingga tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda

| Keterangan                   | B          | T     | Sig.  | Hasil                   |
|------------------------------|------------|-------|-------|-------------------------|
| (Constant)                   | -14977,426 |       |       |                         |
| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0,477      | 5,004 | 0,000 | H <sub>1</sub> diterima |
| Dana Alokasi Umum (DAU)      | 0,150      | 2,859 | 0,005 | H <sub>2</sub> diterima |
| Dana Alokasi Khusus (DAK)    | 0,487      | 4,366 | 0,000 | H <sub>3</sub> diterima |
| Retribusi Daerah (RD)        | 0,029      | 0,030 | 0,976 | H <sub>4</sub> ditolak  |

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel diatas secara sistematis dapat ditulis persamaannya sebagai berikut :

$$Y = -14977,426a + 0,477 \text{ PAD} + 0,150 \text{ DAU} + 0,487 \text{ DAK} + 0,029 \text{ RD}$$

Interpretasi dari masing-masing koefisien variabel sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar -14977,426 menunjukkan bahwa jika variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Retribusi Daerah (RD) diasumsikan konstan maka Alokasi Belanja Modal akan menurun. Koefisien regresi pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,477 menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu semakin meningkat maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat. Koefisien regresi pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,150 menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Umum (DAU) itu semakin meningkat maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat. Koefisien regresi pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,487 menunjukkan bahwa jika Dana Alokasi Khusus (DAK) itu semakin meningkat maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat. Koefisien regresi pada variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,029 menunjukkan bahwa jika Retribusi Daerah (RD) itu semakin meningkat maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat.

Dari perhitungan  $t_{hitung}$  variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,004 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H<sub>1</sub> diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

Dari perhitungan  $t_{hitung}$  variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,859 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga H<sub>2</sub> diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

Dari perhitungan  $t_{hitung}$  variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 4,366 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_3$  diterima, artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

Dari perhitungan  $t_{hitung}$  variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,030 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,976 lebih besar dari 5%, sehingga  $H_4$  ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

Untuk variabel Alokasi Belanja Modal didapatkan hasil bahwa nilai  $F_{hitung}$  (44,127) dengan  $p-value = 0,000$  sedangkan  $F_{tabel}$  (2,463) dengan ketentuan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = k-1$  atau  $4-1 = 3$ , dan  $df_2 = n-k-1$  atau  $105-4-1 = 100$ , hasil uji dari distribusi  $F_{hitung}$  (44,127) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (2,463) dengan  $p-value 0,005 < 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Retribusi Daerah (RD) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Dan dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa model *goodness of fit*.

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi ( $adjusted R^2$ ) sebesar 0,624, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Retribusi Daerah (RD) menjelaskan variasi Alokasi Belanja Modal di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 62,4% dan 37,6% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, yang ditunjukkan dengan hasil uji  $t$  variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5,004 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_1$  diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

Berdasarkan hasil ini menunjukkan tidak adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Lugastoro (2016), Ardiansyah dkk (2015), Bambang Agus Pramuka (2010) menyebutkan menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan hasil penelitian ini adanya kesamaan penelitian yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013).

Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari pusat ke daerah atas diterapkannya otonomi daerah yang merupakan ide dari desentralisasi, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan UU nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU nomor 32 tahun 2004, maka pemerintah mengeluarkan UU nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Saragih:2003). Kebijakan desentralisasi ditujukan mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah dan Solichin, 2006). PAD setidaknya dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, disamping itu pembangunan fasilitas kesehatan dapat bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemda. Jadi dalam hal ini dimensi umur panjang dan sehat dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,859 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_2$  diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk (2015), Bambang Agus Pramuka (2010), Maria Valencia Wahyudi (2015) menyebutkan menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan penelitian ini adanya kesamaan yang dilakukan Saddam Hussein Sulistyandito dan Luqman Hakim (2013), Sugiarti, Surachman, dan Siti Aisjah (2015) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Sumber pendapatan daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan pendapatan bagi daerah selain PAD adalah dana perimbangan. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Non-Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemerintah Daerah dapat dialokasikan untuk belanja modal. Penelitian Holtz Eakin et.al. (1985) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Penggunaan dana ini diharapkan sesuai sasaran bagi keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Apabila kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka tingkat pembangunan manusia akan berhasil.

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, yang ditunjukkan dengan hasil uji t variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 4,366 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_3$  diterima artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan Ardiansyah dkk (2015), Maria Valencia

Wahyudi (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK adalah untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, KB, kehutanan serta perdagangan.

Penggunaan DAK pada dasarnya merupakan kewenangan Pemda karena DAK merupakan bagian dari APBD. Meskipun demikian, dengan alasan agar penggunaan DAK oleh pemda sesuai dengan kepentingan nasional, Pemerintah Pusat mengatur penggunaan DAK melalui berbagai regulasi, seperti peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri teknis berupa petunjuk teknis. Selain berperan dalam menunjang penerimaan daerah, DAK juga berperan cukup penting dalam meningkatkan kapasitas belanja modal pemda dengan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Usman dkk, 2008). Jadi hal ini mampu mendorong pemda agar dapat meningkatkan mutu kualitas pembangunan manusia melalui pengalokasian anggaran belanja modal yang secara otomatis berorientasi pada kesejahteraan publik. Sebab DAK yang apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur.

Berdasarkan hipotesis kelima menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal, yang ditunjukkan dengan

hasil uji t variabel Retribusi Daerah (RD) sebesar 0,030 lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,976 lebih besar dari 5%, sehingga  $H_4$  ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan. Hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Saddam Hussein Sulistyandito dan Maria Valencia Wahyudi (2015) menunjukkan Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Retribusi daerah merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan apabila pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah juga memadai. Meskipun Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah juga tetap harus dapat mengoptimalkan potensi daerahnya untuk dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD maka daerah tersebut akan menjadi daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada penelitian Harianto (2007) dalam Tuasikal (2008) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 5,004 lebih besar dari  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_1$  diterima, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik

signifikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,859 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_2$  diterima, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 4,366 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga  $H_3$  diterima, artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji t variabel Retribusi Daerah (RD) diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 0,030 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,984, dan nilai sig. sebesar 0,976 lebih besar dari 5%, sehingga  $H_4$  ditolak, artinya Retribusi Daerah (RD) tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal secara statistik signifikan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat sebagai berikut: Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. Lingkup penelitian terbatas laporan keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan waktu yang digunakan dalam penelitian terbatas, menambah lagi kabupaten/kota yang lain dan menambah waktu penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Lima, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Agus Pramuka, 2010, Flypaper Effect Pada Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Jawa, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2010, hlm.1-12.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).
- Hadi, Sutrisno, 2008, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Halim, Abdul, 2009, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- M. Munandar, 2001, *Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja*,

*Pengawasan Kerja*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE.

- Maria Valencia Wahyudi, 2015. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, DAU, dan DAK Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4 No. 11.
- Martini, Ni Luh Dina Selvia, Wayan Cipta dan I Wayan Suwendra, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012*. E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Volume
- Maryadi, 2014, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012*, Jurnal, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Meianto, Edy, Betri, Cherrya Dhia Wenny, 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan*, Jurnal, Palembang: STIE Multi Data Palembang.
- Pralita, Dyah 2002, Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Di Pemerintahan Pekalongan.
- Rahmawati, Nur Indah, 2010, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi Sarjana (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.
- Setyowati, Lilis, Yohana Kus Suparwati. 2012, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Prestasi Vol. 9 No 1 - Juni 2012. ISSN 1411 -1497.
- Siswanto, Dodik & Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Sudarwadi, Hustianto. 2015, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)*. ISBN: 978-602-17129-5-5
- Sularmi 2006, Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Keuangan.
- Sularso, Havid dan Restianto E, Yanuar, 2011, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.
- Susetya, Didik 2008, Kinerja APBD Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.
- Wahyuni 2009, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang.